
Sekolah Perempuan Hebat (SPH) Wahana Belajar Bagi Perempuan Rentan di Desa Mekar Jaya-Pacet- Kabupaten Bandung

Tuti Kartika^{1*}, Bambang Rustanto^{2*}, Ramli A Rachman^{3*}, Susilawati^{4*}, Dwi Yuliani⁵

Keywords:

Sekolah Perempuan Hebat, Family Resilience, Women's Empowerment, Feminist Social Work,

Abstract: The complexity of women's issues in Bandung Regency, such as the high rate of child marriage reaching nearly 50% and the large number of Social-Economically Vulnerable Women (PRSE), places women in a subordinate position with low bargaining power within the family. This condition underscores the urgency for structured and sustainable empowerment efforts. This community service activity, initiated by the Center for Community Service (PPM) of Poltekesos Bandung, aims to establish the Sekolah Perempuan Hebat (SPH - School for Phenomenal Women) in Cipatat, Mekar Jaya Village, Pacet, Bandung Regency. SPH is specifically designed as a local institution and a participatory learning space to enhance the capacity of marginalized women in building family *resilience*. The intervention focuses on behavioral change in four core areas: child education and parenting, stunting prevention, domestic violence prevention and management, and family financial management. The method applied in this community service utilizes a *Feminist social work* and Community Organization approach, implemented through four structured stages. These stages include social preparation and community organization, execution (comprising *team building* and participatory assessment), intervention delivery through a four-day capacity-building program, and concluding with evaluation and termination. The program evaluation results demonstrate that the establishment of SPH successfully transformed the *hidden power* of vulnerable women into visible power recognized by the community. Participants experienced a significant increase in knowledge and began adopting positive behavioral changes, particularly in implementing child-friendly parenting and fulfilling nutritional needs to prevent stunting. Although domestic financial management remains constrained by objective financial limitations, community motivation to engage in structured organization increased rapidly. Model validation indicates that the process was highly participatory. The existence of SPH has gained full support from the village government and related local agencies, indicating a high potential for nationwide replication through the networks of PKH Facilitators and Social Workers for Children (Sakti Peksos).

Introduction

Pembangunan nasional yang berkeadilan gender menempatkan perempuan bukan hanya sebagai objek atau penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai subjek sekaligus aktor sentral dalam institusi terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga merupakan fondasi utama dari ketahanan nasional; jika ketahanan keluarga rapuh, maka tatanan sosial, ekonomi, dan pertahanan sebuah bangsa akan ikut melemah. Di dalam ekosistem domestik ini, peran perempuan—khususnya seorang ibu—sangat multidimensional, mulai dari manajer keuangan, pendidik utama anak (*madrasah ula*), penjaga kesehatan gizi keluarga, hingga agen perekat harmoni sosial. Namun, realitas empiris di berbagai daerah di Indonesia,

khususnya di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, menunjukkan sebuah paradoks besar. Di satu sisi perempuan dituntut untuk memikul beban domestik dan sosial yang berat untuk menjaga ketahanan keluarga, tetapi di sisi lain mereka terus berada dalam lingkaran kerentanan struktural yang membatasi kapasitas, hak, dan ruang gerak mereka.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah yang memiliki kompleksitas permasalahan perempuan yang cukup mengkhawatirkan. Kerentanan yang dihadapi oleh kaum perempuan di wilayah ini bersifat akumulatif, yang saling berkelindan antara aspek budaya (kultural), ekonomi (struktural), maupun psikososial. Isu-isu krusial seperti tingginya angka pernikahan di usia anak, dominasi jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), maraknya pekerja perempuan informal dengan upah rendah, serta tingginya risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi potret buram yang memerlukan intervensi mendesak.

Salah satu akar masalah utama dari rendahnya kualitas hidup perempuan di Kabupaten Bandung adalah tingginya prevalensi pernikahan dini. Berdasarkan Data Terpilah Statistik Gender dan Anak Provinsi Jawa Barat, rata-rata sebanyak 20,38% perempuan usia 15–49 tahun melakukan perkawinan pertama pada usia kurang dari 17 tahun. Situasi di Kabupaten Bandung bahkan jauh lebih kritis dari rata-rata provinsi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa persentase perempuan yang pernikahan pertamanya dilakukan ketika berumur kurang dari 16 tahun mencapai 22,23%. Sementara itu, persentase perempuan yang menikah pertama kali pada umur 17–18 tahun berada di angka 24,21%. Jika diakumulasi, angka ini mengindikasikan bahwa hampir 50% (tepatnya 46,44%) perempuan di Kabupaten Bandung mengalami pernikahan di usia anak, yaitu di bawah batas usia dewasa 18 tahun.

Pernikahan di usia anak membawa dampak domino yang sangat merusak bagi masa depan perempuan dan ketahanan keluarga yang mereka bangun. Secara biologis dan psikologis, anak perempuan di bawah usia 18 tahun belum memiliki kematangan reproduksi dan emosional untuk mengemban peran sebagai istri dan ibu. Kondisi ini berkorelasi langsung pada kegagalan pola asuh anak, tingginya angka perceraian, risiko kematian ibu melahirkan, serta yang kini menjadi perhatian nasional: tingginya angka anak yang mengalami pertumbuhan kerdil akibat salah gizi atau stunting. Ketika seorang ibu anak tidak memahami esensi pemenuhan gizi dan pengasuhan positif, generasi yang dilahirkannya pun akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketertinggalan kualitas sumber daya manusia.

Tantangan kultural tersebut diperparah oleh impitan beban ekonomi struktural. Berdasarkan data makro, penduduk miskin di Kabupaten Bandung berjumlah sekitar 268,02 ribu jiwa atau setara dengan 7,36% dari keseluruhan jumlah penduduk. Dari total rumah tangga miskin tersebut, sebanyak 7,25% di antaranya dikepalai oleh perempuan secara mandiri akibat perceraian, kematian suami, atau penelantaran ekonomi. Lebih spesifik lagi, data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari Dinas Sosial Jawa Barat mengonfirmasi kehadiran 25.093 jiwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kabupaten Bandung. PRSE didefinisikan sebagai perempuan dewasa berstatus menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari akibat keterbatasan keterampilan, ketiadaan aset modal, maupun marginalisasi pasar kerja.

Kompleksitas masalah yang berlapis—mulai dari pernikahan anak hingga beban kemiskinan ekonomi—pada akhirnya menempatkan perempuan pada posisi yang ter subordinasi, baik di dalam sistem

internal keluarga maupun di ranah sosial kemasyarakatan. Perempuan rentan ini memiliki *bargaining position* (posisi tawar) yang sangat rendah di hadapan suami atau dominasi budaya patriarki setempat. Ketiadaan kemandirian finansial dan keterbatasan akses terhadap informasi membuat banyak di antara mereka memilih sikap pasrah, apatis, dan mengalami frustrasi akut. Mereka merasa tidak memiliki kekuatan atau daya tawar untuk menuntut haknya, menghentikan kekerasan fisik maupun verbal yang mereka alami, atau sekadar ikut serta dalam pengambilan keputusan penting keluarga. Tantangan hidup yang dihadapi dirasakan terlalu besar dan mustahil untuk dilawan jika harus dihadapi oleh diri mereka sendiri secara individual.

Meskipun berada dalam situasi kerentanan yang ekstrem, kelompok perempuan ini sejatinya memiliki sebuah modalitas psikososial yang luar biasa. Konsep prototipe intervensi ini menyebut mereka sebagai "Perempuan Hebat". Istilah "Hebat" disematkan bukan karena mereka bebas dari masalah, melainkan karena dalam kungkungan kompleksitas masalah yang menghimpit, mereka memiliki daya lentur (*resilience*) dan kekuatan internal tersembunyi (*hidden power*) yang membuat mereka mampu bertahan hidup, merawat anak-anak mereka, dan bahkan dalam banyak kasus, memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung ekonomi keluarga demi menyambung hidup. Kekuatan laten inilah yang menjadi modal sosial primer yang bernilai tinggi untuk diaktivasi.

Dalam perspektif praktik pekerjaan sosial makro dan pemberdayaan masyarakat, membiarkan perempuan hebat berjuang sendirian secara terisolasi adalah sebuah kegagalan sistemik. Potensi *hidden power* mereka harus ditransformasikan menjadi *visible power* (kekuatan nyata yang tampak dan terorganisir). Salah satu strategi terbaik untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendekatan *Feminist social work* (Dominelli & McLeod, 1989). Pendekatan ini memandang bahwa masalah yang dialami perempuan bukanlah sekadar masalah personal-individual, melainkan akibat dari ketimpangan relasi kuasa sosiostruktural. Oleh karena itu, solusinya harus bersifat kolektif melalui pembentukan institusi lokal (Suharto, 2006). Organisasi atau institusi lokal yang tumbuh di tingkat komunitas terdekat (RT/RW/Desa) memiliki keunggulan berupa kedekatan emosional, pengalaman geografis yang sama, serta kemudahan akses mobilitas bagi perempuan.

Berangkat dari pemikiran mendalam tersebut, Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Poltekesos Bandung menginisiasi sebuah program intervensi berbasis komunitas yang diberi nama Sekolah Perempuan Hebat (SPH). Program ini secara khusus difokuskan di Kampung Cipatat, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan wilayah rural-suburban di Kabupaten Bandung yang memiliki konsentrasi tinggi perempuan rentan, PRSE, serta risiko pernikahan dini beserta dampak turunannya seperti ancaman stunting balita.

Sekolah Perempuan Hebat (SPH) dikonseptualisasikan bukan sebagai lembaga pendidikan formal yang kaku, melainkan sebagai sebuah ruang aman (*safe space*) dan wahana belajar non-formal yang inklusif bagi para perempuan hebat. Di dalam SPH, prinsip pembelajaran mengedepankan metode andragogi (pendidikan orang dewasa) yang partisipatif, di mana sesama perempuan hebat dapat saling belajar (*learning each other*), saling berbagi beban emosional, dan secara kolektif merumuskan solusi atas problem sehari-hari dengan mengoptimalkan kearifan dan budaya lokal setempat.

SPH didesain untuk menyasar perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) perempuan secara komprehensif pada empat pilar ketahanan keluarga. Pertama, pilar Pendidikan dan Pengasuhan Anak, untuk membekali ibu-ibu muda dengan pengetahuan pola asuh positif (*positive parenting*) guna memutus rantai trauma antargenerasi. Kedua, pilar Pencegahan Stunting, guna memberikan literasi gizi, kesehatan reproduksi, dan sanitasi lingkungan demi menyelamatkan generasi masa depan desa dari ancaman malnutrisi kronis. Ketiga, pilar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), untuk membangun kesadaran kritis akan hak-hak hukum perempuan sebagai warga negara, membangun kemandirian mental, dan membuka akses kanal pengaduan jika terjadi kekerasan. Keempat, pilar Pengelolaan Keuangan Keluarga, guna melatih kecakapan mengelola pendapatan mikro yang terbatas agar dapat dialokasikan secara cermat untuk kebutuhan esensial seperti pendidikan dan kesehatan anak.

Melalui bekal pengetahuan, keterampilan praktis, dan kesadaran kritis yang diperoleh di SPH, diharapkan posisi tawar (*bargaining position*) dan kesetaraan (*equality*) perempuan di dalam rumah tangga dapat meningkat secara signifikan. Mereka tidak lagi dipandang dan memandang diri sendiri sebagai objek tersubordinasi yang pasrah, melainkan sebagai mitra sejajar suami dalam mengemudikan bahtera rumah tangga. Lebih jauh lagi, pengorganisasian diri dalam SPH diharapkan mampu meningkatkan eksistensi dan pengakuan sosial mereka di mata masyarakat, mendorong advokasi keamanan domestik, serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Melalui wadah institusi lokal SPH ini, energi kolektif perempuan hebat di Kampung Cipatat diorganisir secara terstruktur untuk menghantarkan transformasi nyata menuju perwujudan keluarga yang berketahanan sosial, mandiri, dan bermartabat.

Method

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada prinsip kesadaran kolektif yang terorganisir (*organized collective consciousness*). Intervensi tidak dilakukan secara individual atau parsial, melainkan melalui pengorganisasian kelompok rentan agar mampu mengenali, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Pendekatan utama yang digunakan dalam pemodelan ini merujuk pada prinsip-prinsip intervensi komunitas, pengembangan masyarakat (*community development*), dan praktik pekerjaan sosial makro (Homan, 2008; Netting, Kettner, & McMurty, 2004).

Secara epistemologis, pengabdian ini mengintegrasikan perspektif *Feminist social work* (Dominelli & McLeod, 1989), di mana proses pemberdayaan berpusat pada upaya memanusiakan subjek (perempuan), menggali perasaan, pikiran, kebutuhan, serta mengubah kekuatan tersembunyi (*hidden power*) menjadi kekuatan nyata (*visible power*). Seluruh proses pembelajaran mengedepankan metode andragogi yang partisipatif dan dialogis, bukan doktriner, di mana pengalaman hidup perempuan hebat dijadikan sebagai basis pengetahuan bersama (*shared knowledge*).

Untuk mewujudkan model intervensi yang akuntabel dan dapat direplikasi, metodologi pelaksanaan pengabdian ini distrukturkan ke dalam empat tahapan utama yang berjalan secara berkesinambungan sebagai berikut:

[Persiapan Sosial & Organisasi] → [Pelaksanaan & Asesmen] → [Intervensi SPH] → [Evaluasi & Replikasi]

2.1. Tahap Persiapan Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat (Durasi: 2 Hari)

Tahap persiapan sosial (*social preparation*) merupakan langkah krusial dalam praktik pekerjaan sosial makro yang bertujuan untuk menciptakan iklim lingkungan yang kondusif, memperoleh legitimasi formal, serta membangun kepercayaan (*rapport*) awal dengan komunitas lokal (Ife, 2002). Tahapan yang berlangsung selama dua hari ini mencakup dua aktivitas interdependen:

(1). Koordinasi Formal dan Informal

Tim pengabdian melakukan sosialisasi dan koordinasi multilateral dengan pemangku kepentingan di lokus pengabdian, yaitu Kampung Cipatat, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Langkah operasional yang dilakukan meliputi: Penyampaian Surat Formal: Mengajukan permohonan izin dan dukungan kelembagaan dari Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Poltekesos Bandung kepada Kepala Desa Mekar Jaya. Pertemuan Tatap Muka dan Komunikasi Digital: Membangun komunikasi intensif dengan aparat RW, RT, dan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh pemuda) baik melalui media digital (WhatsApp dan telepon) maupun kunjungan langsung. Metode *Transect Walk*: Tim melakukan berjalan telusur wilayah (*transect walk*) di Kampung Cipatat untuk mengenali karakteristik geografis, pola pemukiman, hambatan fisik, sekaligus menyapa warga secara informal guna meminimalkan jarak sosial antara tim pengabdian dan masyarakat setempat.

(2.) Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Analysis*)

Secara simultan, tim melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang akan terlibat, yang dikategorikan menjadi dua kelompok: *Potential Group* (Kelompok Potensial): Mengidentifikasi lembaga lokal atau individu yang memiliki pengaruh, ketertarikan, dan komitmen untuk mendukung keberlanjutan Sekolah Perempuan Hebat (SPH). Pihak yang teridentifikasi antara lain kader Posyandu, pengurus Majelis Taklim, serta perwakilan lini lapangan seperti Pendamping PKH dan Sakti Peksos lokal. *Target Group* (Kelompok Sasaran): Mengidentifikasi dan menetapkan perempuan hebat di Kampung Cipatat yang berada dalam kategori rentan (seperti Perempuan Rawan Sosial Ekonomi atau PRSE, ibu muda berisiko, dan perempuan kepala keluarga) yang akan diorganisir menjadi anggota inti SPH sebagai subjek perubahan perilaku.

2.2. Tahap Pelaksanaan dan Asesmen Partisipatif (Durasi: 2,5 Hari)

Setelah pondasi sosial terbangun, kegiatan dilanjutkan pada tahap pelaksanaan awal dan penggalian data masalah serta potensi secara mendalam. Tahap ini memakan waktu 2,5 hari dengan rincian operasional:

(1). *Team building* dan Trust Building (1 Hari)

Satu hari penuh dialokasikan untuk menyelenggarakan forum penyamaan persepsi dan pencairan suasana (*ice breaking*). Aktivitas ini dirancang untuk mengorganisir *potential group* dan menumbuhkan rasa saling percaya (*trust*) antara tim pengabdian, tokoh masyarakat, dan calon peserta SPH. Melalui dialog

terbuka, tim memaparkan urgensi, visi, misi, serta manfaat jangka panjang dari pembentukan wadah belajar bersama bagi perempuan.

(2). Asesmen Partisipatif (1,5 Hari)

Asesmen dilakukan bukan dengan menempatkan masyarakat sebagai objek penelitian, melainkan menggunakan instrumen *Participatory appraisal* (Tropman, 1995). Teknik pengumpulan data gabungan yang digunakan meliputi pertemuan warga (*town hall meeting*), observasi partisipatif, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Asesmen difokuskan pada dua dimensi: Asesmen Masalah dan Kebutuhan (*Need Assessment*): Menggali persoalan riil ke deputian perempuan, hambatan dalam pengasuhan anak, kendala ekonomi harian, indikasi stunting balita, serta pemahaman mengenai hak-hak reproduksi dan gender. Asesmen Kapasitas dan Sumber Daya (*Capacity Assessment*): Memetakan kekuatan internal individu perempuan (daya juang, motivasi belajar) serta modal sosial lingkungan yang dapat dioptimalisasi (kegiatan *Perelek*, Posyandu, dan Majelis Taklim) sebagai daya dukung penyelesaian masalah.

2.3. Tahap Pelaksanaan Intervensi (Durasi: 4 Hari)

Tahap intervensi merupakan inti dari pemodelan SPH, di mana rancangan aksi diimplementasikan secara terstruktur selama empat hari berturut-turut. Tahapan ini mengintegrasikan proses pengorganisasian institusi dan edukasi kritis:

[Pembentukan Struktur TKM] → [Penyusunan Kurikulum SPH] → [Edukasi & Penguatan 4 Pilar]

(1). Formalisasi Institusi SPH

Tim memfasilitasi pembentukan SPH sebagai institusi lokal baru yang sah di tingkat komunitas. Untuk menjamin kemandirian organisasi, dibentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) dengan struktur kepengurusan yang dipilih secara musyawarah oleh dan dari para anggota perempuan hebat, meliputi posisi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Bidang.

(2). Penyusunan Rancangan Pembelajaran Partisipatif

Berdasarkan hasil analisis data asesmen, tim pengabdian bersama TKM merumuskan rencana intervensi, jadwal kelas, tujuan instruksional, serta menetapkan metode diskusi kelompok terarah yang berbasis pada kebudayaan setempat.

(3) Penguatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Pelaksanaan kelas SPH dilakukan secara dialogis menggunakan media interaktif, studi kasus, dan simulasi peran. Penguatan kapasitas ini menasar pada perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik pada empat klaster materi utama: Klaster Pengasuhan Positif: Edukasi mengenai metode mendidik anak tanpa kekerasan fisik dan verbal, serta pemenuhan hak psikologis anak. Klaster Pencegahan Stunting: Pelatihan praktis mengenai pemenuhan gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) memanfaatkan bahan pangan lokal yang ekonomis. Klaster Pengelolaan Keuangan Keluarga: Praktis pencatatan kas rumah tangga, pemisahan kebutuhan dan keinginan, serta strategi menabung mikro. Klaster Harmoni Gender: Membangun kesadaran hukum terkait UU KDRT, hak-hak istri, serta teknik komunikasi asertif guna meningkatkan posisi tawar perempuan dalam relasi domestik.

2.4. Tahap Evaluasi dan Terminasi (Tahap Akhir)

Sebagai penutup siklus intervensi model, dilakukan tahap evaluasi untuk mengukur efektivitas program dan diakhiri dengan proses pemutusan hubungan kerja sama formal (terminasi) secara sehat.

Teknik evaluasi yang digunakan bersifat kualitatif dan konfirmatif, menggabungkan empat metode: (1) Pertemuan warga, sebagai forum refleksi kolektif di mana anggota SPH memaparkan testimoni perubahan; (2) Wawancara evaluatif, terhadap aparat desa untuk memvalidasi dampak; (3) Observasi, untuk melihat perubahan interaksi sosial anggota; dan (4) Pendampingan lapangan pasca-kegiatan, guna memantau konsistensi penerapan perilaku baru.

Indikator evaluasi difokuskan pada tiga ranah, yaitu peningkatan wawasan konseptual, inisiasi praktik pengasuhan ramah anak dan pencegahan stunting di rumah tangga, serta hambatan struktural-finansial yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan harian. Proses terminasi dilakukan dengan menyerahkan kelanjutan pengelolaan SPH secara penuh kepada TKM di bawah pengawasan Pemerintah Desa Mekar Jaya dan jejaring pendamping sosial setempat demi menjaga keberlanjutan (*sustainability*) model.

Result and Discussion

3.1. Capaian Pembentukan Institusi Lokal dan Dinamika Kelompok

Proses pengabdian masyarakat yang berlokasi di Kampung Cipatat, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung ini telah berhasil mentransformasikan kerentanan sosial menjadi sebuah kekuatan terorganisir melalui pembentukan Sekolah Perempuan Hebat (SPH). SPH kini resmi berdiri sebagai sebuah institusi lokal tingkat akar rumput yang memiliki struktur kepengurusan mandiri dalam bentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM). Kepengurusan ini diisi langsung oleh perwakilan perempuan hebat setempat yang mengemban tugas sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

Keberhasilan pembentukan SPH ini menunjukkan bahwa perempuan rentan, jika diberikan ruang aman (*safe space*) yang tepat, mampu mengorganisasikan diri mereka secara kolektif. Penataan kelembagaan lokal ini sejalan dengan teori organisasi komunitas yang dikemukakan oleh para ahli pekerjaan sosial makro. Edi Suharto menegaskan bahwa institusi lokal di tingkat komunitas merupakan jangkar utama dalam program pemberdayaan masyarakat. Keberadaan institusi lokal yang lahir dari rahim komunitas itu sendiri menjamin adanya kedekatan personal, ikatan emosional, dan rasa kepemilikan yang tinggi di antara anggotanya, sehingga program intervensi tidak lagi dirasakan sebagai proyek top-down yang asing, melainkan sebagai sebuah kebutuhan internal.

Dinamika kelompok yang terbangun selama proses pembentukan SPH memperlihatkan pergeseran psikososial yang luar biasa. Pada fase awal intervensi, tim pengabdian menemukan resistensi psikologis berupa rasa rendah diri, kepasrahan terhadap nasib, dan ketakutan untuk berbicara di depan publik. Namun, melalui metode *team building* yang inklusif dan pendekatan Feminist Social Work, hambatan mental tersebut berhasil dilebur. Anggota SPH mulai menyadari bahwa masalah kemiskinan, kegagalan pola asuh, dan kerentanan domestik yang mereka alami bukanlah aib personal yang harus dipikul sendirian, melainkan akibat dari ketimpangan struktural yang dihadapi bersama. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi motor penggerak perubahan perilaku mereka.

3.2. Hasil Asesmen Partisipatif: Memetakan Akar Masalah dan Modal Sosial

Melalui metode *Participatory appraisal*, proses asesmen berhasil memetakan dua dimensi penting secara naratif, yaitu spektrum permasalahan hidup perempuan di Kampung Cipatat serta modal sosial tersembunyi yang mereka miliki. Dari sisi permasalahan dan kebutuhan, teridentifikasi bahwa mayoritas anggota SPH tidak memiliki penghasilan mandiri, memiliki tingkat pengetahuan yang sangat minim mengenai pola asuh anak yang benar, dan menghadapi ancaman nyata berupa keberadaan balita yang potensial mengalami stunting.

Selain itu, manajemen keuangan rumah tangga mereka masih sangat konvensional dan rentan gali lubang tutup lubang. Yang paling memprihatinkan, terdapat tabu budaya yang kuat untuk membicarakan hak-hak istri dalam perkawinan, sehingga memicu tingginya posisi subordinat di hadapan suami dan ketidakberanian untuk membangun dialog setara di dalam rumah.

Namun, di balik tumpukan masalah tersebut, asesmen partisipatif juga berhasil mengungkap modalitas sosial yang luar biasa. Karakteristik utama dari perempuan di Kampung Cipatat adalah memiliki daya juang atau resiliensi yang sangat tinggi serta antusiasme yang besar untuk belajar dan merubah nasib. Di tingkat lingkungan, komunitas ini didukung oleh eksistensi Posyandu yang aktif, kegiatan keagamaan mingguan melalui Majelis Taklim, serta kearifan lokal berupa tradisi *Perelek*—sebuah sistem jaring pengaman sosial berbasis iuran beras atau uang sukarela antar-tetangga untuk membantu warga yang sedang mengalami krisis.

3.3. Pembahasan Penguatan Kapasitas Berdasarkan Perspektif Ahli

Penguatan kapasitas yang dilaksanakan selama empat hari berfokus pada empat pilar ketahanan keluarga, yang dalam pembahasannya dikonfirmasi dengan teori-teori pekerjaan sosial mutakhir:

(1). Pilar Pendidikan dan Pengasuhan Anak

Edukasi pada pilar ini berhasil mengubah paradigma pola asuh otoriter dan permisif menjadi pola asuh positif (*positive parenting*). Kaum perempuan diajarkan untuk memahami hak-hak dasar anak dan menghentikan kekerasan verbal maupun fisik yang selama ini dianggap biasa sebagai metode mendisiplinkan anak. Berdasarkan pemikiran Dubois dan Miley, pemberdayaan harus menyasar pada penguatan kompetensi personal. Ketika seorang ibu diresibekali dengan kecakapan pengasuhan yang humanis, mereka sedang memutus rantai transmisi trauma dan kemiskinan antargenerasi. Pengetahuan baru ini membuat aktivitas mengasuh anak di Kampung Cipatat berubah dari sebuah beban yang penuh tekanan menjadi sebuah proses yang menyenangkan dan bermakna.

(2). Pilar Pencegahan Stunting

Intervensi pada aspek kesehatan difokuskan pada pemahaman gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Para ahli pekerjaan sosial medis menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan klinis bagi-bagi biskuit gizi, melainkan harus menyentuh ranah perubahan perilaku ibu selaku pengelola konsumsi domestik. Melalui SPH, perempuan hebat dilatih untuk memanfaatkan bahan pangan lokal yang murah namun padat gizi, menjaga sanitasi lingkungan, serta memaksimalkan layanan Posyandu. Pengetahuan ini memberikan kemandirian bagi perempuan untuk

melindungi anak-anak mereka dari bahaya malnutrisi kronis tanpa harus bergantung pada subsidi luar yang mahal.

(3). Pilar Pengelolaan Keuangan Keluarga

Materi manajemen keuangan memberikan literasi mendasar mengenai cara memisahkan antara kebutuhan absolut dan keinginan konsumtif, cara mencatat pengeluaran harian, serta pentingnya dana darurat mikro. Mark S. Homan menyatakan bahwa kontrol terhadap sumber daya ekonomi adalah salah satu indikator utama dari keberhasilan perubahan komunitas. Meskipun dalam implementasinya perubahan perilaku keuangan di Kampung Cipatat masih menghadapi kendala objektif berupa sangat terbatasnya jumlah uang yang dikelola, para peserta kini telah memiliki kesadaran untuk tidak terjebak dalam utang konsumtif yang eksploitatif dan mulai memanfaatkan skema tabungan kelompok kecil atau mengoptimalkan tradisi *Perelek* desa.

(4). Pilar Harmoni Gender dalam Keluarga

Ini merupakan pilar yang paling menantang sekaligus inovatif dalam model SPH. Perempuan diberikan edukasi mengenai kesetaraan, pengenalan bentuk-bentuk KDRT, serta teknik komunikasi asertif dengan suami. Berdasarkan perspektif *Feminist social work* yang diusung oleh Lena Dominelli dan Eileen McLeod, marginalisasi perempuan berakar dari adanya ketimpangan relasi kuasa sosiostruktural yang terinternalisasi dalam institusi keluarga. Pengorganisasian perempuan melalui SPH berhasil membongkar belenggu mitos tersebut. Kaum perempuan diajak untuk mengenali perasaan, pikiran, dan hak-hak reproduksi maupun hukumnya, sehingga terjadi transformasi dari kekuatan tersembunyi (*hidden power*) menjadi kekuatan nyata (*visible power*). Perempuan hebat di Kampung Cipatat kini mulai memiliki keberanian untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan membangun kemitraan yang setara dengan suami mereka, yang secara otomatis menaikkan *bargaining position* mereka di ranah domestik.

3.4. Validasi Model, Dampak, dan Keberlanjutan Program

Validasi lapangan yang dilakukan melalui wawancara konfirmatif dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan peserta memberikan legitimasi kuat bahwa model SPH memiliki tingkat efektivitas dan akseptabilitas yang tinggi. Aparat desa menyatakan bahwa materi yang diajarkan sangat kontekstual dengan kebutuhan riil warga dan berkomitmen untuk memperluas jangkauan SPH dengan mengintegrasikannya ke dalam rencana kerja dan anggaran belanja desa pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dampak nyata dari kehadiran SPH tidak hanya dirasakan pada level individu berupa peningkatan wawasan, tetapi juga pada level struktural-komunitas. SPH telah menumbuhkan motivasi berorganisasi yang sehat, terstruktur, dan terarah di kalangan perempuan rural. Kegiatan ini merangsang kontribusi aktif masyarakat secara swadaya untuk ikut serta memikirkan kesejahteraan anak dan perlindungan perempuan di wilayahnya.

Keberlanjutan (*sustainability*) model ini dijamin oleh adanya sistem dukungan (*support system*) yang kuat di tingkat kabupaten. Dinas Sosial Kabupaten Bandung serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) telah menyatakan kesiapannya untuk menjadikan SPH di Desa Mekar Jaya sebagai proyek percontohan (*pilot project*). Dengan adanya komitmen pendampingan intensif yang berkelanjutan dari institusi pemerintah daerah yang

berkolaborasi dengan civitas akademika Poltekesos Bandung, SPH bertransformasi dari sekadar kegiatan pengabdian masyarakat sesaat menjadi sebuah gerakan sosial lokal yang mandiri dan berkesinambungan menuju terwujudnya keluarga yang berketahanan sosial total

Conclusion

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui inisiasi dan pembentukan Sekolah Perempuan Hebat (SPH) di Kampung Cipatat, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, secara empiris telah membuktikan efektivitasnya yang sangat tinggi. SPH bukan sekadar sebuah program pelatihan jangka pendek, melainkan berhasil mentransformasikan diri menjadi sebuah ruang aman (*safe space*) sekaligus wadah pembelajaran berkelanjutan berbasis institusi lokal yang sah bagi kelompok perempuan rentan di tingkat akar rumput. Melalui penerapan metode pekerjaan sosial makro yang sangat partisipatif, dialogis, dan mengedepankan prinsip-prinsip Feminist Social Work, intervensi ini secara nyata mampu mendongkrak kapasitas kognitif, afektif, dan psikomotorik para anggotanya dalam menghadapi kompleksitas problematika kehidupan domestik maupun sosial.

Secara substansial, peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku yang dihasilkan oleh model SPH ini mencakup empat pilar krusial ketahanan keluarga. SPH telah membekali para ibu dengan pemahaman mendalam mengenai pola pengasuhan anak yang positif dan ramah, yang bertujuan memutus mata rantai trauma kekerasan lintas generasi. Di sektor kesehatan, SPH berkontribusi nyata pada deteksi dan pencegahan stunting secara dini melalui pemanfaatan sumber pangan lokal yang padat gizi.

Pada aspek ekonomi dasar, model ini melatih kecakapan perempuan dalam tata kelola keuangan domestik yang lebih disiplin, cermat, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan esensial. Terakhir, pada aspek relasi sosial-hukum, SPH terbukti efektif memperkuat *bargaining position* (posisi tawar) dan kesetaraan gender perempuan di hadapan suami, yang berimplikasi langsung pada pencegahan serta penanganan dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada akhirnya, SPH membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh dilakukan secara individual, melainkan harus dikonsolidasikan melalui pengorganisasian komunitas. SPH berhasil mengonversi kekuatan tersembunyi (*hidden power*) perempuan rentan menjadi kekuatan nyata (*visible power*) yang terstruktur, yang bertindak sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ekosistem keluarga berketahanan sosial, mandiri, setara, dan bermartabat.

4.2. Rekomendasi dan Potensi replikasi

1. Strategi Replikasi Nasional

Mengingat tingkat keberhasilan dan akseptabilitas model Sekolah Perempuan Hebat (SPH) yang sangat tinggi di tingkat lokal, model intervensi ini memiliki prospek diseminasi dan potensi replikasi yang sangat luas serta strategis pada skala nasional. Upaya penyebaran kemanfaatan model ini dapat ditempuh melalui dua jalur utama yang saling melengkapi, yaitu jalur praktisi lapangan dan jalur akademis.

Pada jalur praktisi pekerjaan sosial, model SPH dapat diintegrasikan secara struktural ke dalam program nasional yang sudah berjalan masif di bawah naungan Kementerian Sosial. Saat ini, Indonesia

diperkuat oleh kekuatan lini lapangan yang sangat besar, yaitu sekitar 800 orang Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang berfokus pada perlindungan anak, serta lebih dari 40.000 orang Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersentuhan langsung dengan keluarga miskin.

Jika mekanisme, kurikulum, dan tahapan intervensi SPH ini diadopsi secara resmi sebagai rujukan teknis operasional dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) oleh Pendamping PKH maupun dalam program Penguatan Kapasitas Keluarga (PKK) oleh Sakti Peksos, maka gerakan pemberdayaan ini akan mengalami replikasi massal yang masif dan berpotensi menjangkau lebih dari 40.800 wilayah kerja di seluruh pelosok Indonesia secara simultan.

Sementara itu, pada jalur akademis, proses diseminasi kebaruan model ini dapat diintegrasikan secara terstruktur ke dalam kurikulum pendidikan tinggi pekerjaan sosial, khususnya di Poltekesos Bandung. Model pengorganisasian SPH ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan studi kasus atau materi wajib dalam mata kuliah Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak serta mata kuliah Pemberdayaan Perempuan. Setiap tahunnya, materi ini akan diserap oleh sekitar 150 mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan dan 7 mahasiswa Program Studi Magister Terapan yang mengontrak mata kuliah terkait. Melalui strategi integrasi kurikulum ini, lembaga akademis akan berhasil mencetak sedikitnya 157 orang agen perubahan baru setiap tahunnya. Para lulusan ini nantinya akan membawa, mempraktikkan, dan menyebarkan model SPH ke berbagai lembaga pelayanan sosial di seluruh wilayah penempatan kerja mereka kelak.

2. Pengguna Model

Sebagai sebuah model intervensi pekerjaan sosial makro yang komprehensif, SPH sangat direkomendasikan untuk digunakan secara luas oleh berbagai aktor pembangunan sosial. Di tingkat praktisi, model ini dapat menjadi panduan taktis bagi para pekerja sosial profesional, aktivis kemanusiaan, dan organisasi non-pemerintah (LSM) dalam merancang program penguatan kapasitas perempuan yang berbasis pada modal sosial institusi lokal. Bagi para Pendamping PKH, rumpun materi dan tahapan partisipatif SPH dapat diadaptasi sebagai variasi metode P2K2 yang lebih kontekstual, dinamis, dan berpusat pada pemecahan masalah riil Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Lebih jauh lagi, model SPH ini sangat ideal untuk diadopsi oleh institusi birokrasi pemerintah daerah, khususnya kolaborasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan. Integrasi lintas dinas ini akan mengubah model SPH menjadi sebuah platform program bersama yang holistik untuk menyelesaikan berbagai isu krusial di tingkat akar rumput secara integratif, mulai dari penurunan angka kemiskinan, pemutusan rantai pernikahan dini, pencegahan stunting nasional, hingga penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa.

References

- Dominelli, L., & McLeod, E. (1989). *Feminist Social Work*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dubois, B., & Miley, K. K. (2005). *Social Work: An Empowering Profession (5th ed.)*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Homan, M. S. (2008). *Promoting Community Change: Making It Happen in The Real World*. Thomson Brooks/Cole.

- Ife, J. (2002). *Community Development: Creating Community Alternative Vision Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Jenkins, M. B., dkk. (1991). *Feminist social work Practice in Clinical Settings*. New Delhi: Sage Publications.
- Mac Canon, L. (2002). *Women and Politics*. London: Sage.
- Netting, F. E., Kettner, P. M., & McMurty, S. L. (2004). *Social Work Macro Practice*. USA: Pearson Education, Inc.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Tropman, J. E. (Ed.). (1995). *Tactics and Techniques of Community Intervention* (3rd ed.). Illinois.
- Walton, G. R. (1975). *Women in Social Work*. London and Boston: Routledge & Kegan Paul